

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Percepatan pembangunan bidang ekonomi memerlukan adanya penguatan struktur dan kebijakan yang mampu menopang arus lalu lintas perdagangan secara terintegrasi. Disamping pengembangan infrastruktur, pola distribusi barang dan jasa antar wilayah perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan gejolak harga di pasaran. Ketergantungan supply barang dan jasa dari wilayah lain seringkali menyebabkan terjadinya fluktuasi harga di tingkat pedagang eceran atau konsumen. Guna menciptakan stabilitas harga di tingkat perdagangan eceran secara berkesinambungan, diperlukan ketersediaan informasi yang dianggap relevan.

Salah satu alat yang bisa dijadikan sumber informasi untuk memantau pergerakan harga di tingkat konsumen adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang atau jasa. Kenaikan IHK dapat menyebabkan peningkatan suku bunga, meningkatkan pertumbuhan uang beredar, meningkatkan daya tarik mata uang, dan menaikkan inflasi.

Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah Non IHK sehingga perkembangan harga yang terjadi di tingkat konsumen tidak dijadikan dasar dalam perhitungan inflasi secara Nasional. Namun demikian, Nilai Inflasi Kabupaten Sukabumi dapat mengacu kepada nilai Inflasi Kota terdekat yaitu Kota Sukabumi.

Sebagai kabupaten Non IHK, maka analisis dan pelaporan menggunakan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihitung BPS Pusat dengan sumber data dari SP2KP Kemendag setiap minggu. IPH menunjukkan bahwa terjadi Perubahan Harga yang sangat significant selama 1 Minggu pada komoditas tertentu. Dengan demikian IPH merupakan Proxy inflasi bagi Kabupaten Non-IHK.

Secara Nasional, analisis Indeks Perkembangan Harga dilakukan terhadap 20 (dua puluh) komoditas yaitu : Beras Medium, Daging ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung terigu, Daging Sapi, Udang, Ikan Kembung, Mie Instan, Tempe, Tahu Mentah, Pisang, Susu Bubuk Balita, Susu Bubuk dan Jeruk.

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga komoditas pangan pilihan yang sangat berpengaruh terhadap inflasi di Kabupaten Sukabumi selama Triwulan III (Periode Juli s/d September 2024) mengalami fluktuasi dan terdapat kecenderungan mengalami penurunan dan lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II. Adapun komoditas utama yang menyebabkan terjadinya penurunan harga yang signifikan terdapat 5 (lima) Komoditas yaitu : Cabai Rawit, Cabai Merah, Bawang Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras.

Indeks perkembangan Harga di Kabupaten Sukabumi, mulai mengalami tren penurunan sejak minggu ke Tiga Bulan Agustus dan terus anjlok sampai akhir Bulan September 2024. Penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) ini dipicu oleh menurunnya harga dari komoditas CABAI RAWIT (-1,1415), CABAI MERAH (-0,4397), TELUR AYAM RAS (-0,2662).

Indeks Perkembangan Harga terendah selama Triwulan III terjadi pada Bulan September sebesar -1.980 % disumbang oleh Penurunan harga komoditas Cabai Rawit, Cabai Merah dan Telur Ayam Ras.

Indeks Perkembangan Harga pada Triwulan III Tahun 2024 jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Perkembangan Harga Triwulan II Tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa Perubahan harga Tahun 2024 sangat rendah yang artinya terjadi deflasi yang cukup dalam.

Dilihat dari pola pergerakan harga pangan di atas maka terdapat kecenderungan untuk beberapa komoditas mengalami penurunan harga atau sebagai penyumbang IPH Negatif. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa komoditas pada sentra-sentra produksi mengalami panen raya sehingga ketersediaan akan melimpah.

Patut diwaspadai adalah kenaikan harga Minyak Goreng dan mulai berkurangnya ketersediaan di pasar-pasar tradisional. Saat ini, harga minyak goreng sudah mulai mengalami kenaikan.

Fenomena terjadinya deflasi berdasarkan proyeksi Inflasi di Kabupaten Sukabumi, sejalan dengan Perkembangan Inflasi secara Nasional dimana berturut-turut sebanyak 5 kali mengalami deflasi. Kondisi ini patut diwaspadai sebagai akibat DAYA BELI masyarakat yang menurun.

Berdasarkan Data dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Daya Beli Kabupaten Sukabumi menempati urutan 21 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Perubahan Harga pada Triwulan III Tahun 2024 menunjukkan penurunan atau angka negatif. Faktor utama penyebab adanya penurunan harga beberapa komoditas di Kabupaten Sukabumi bersumber dari kelompok harga bahan makanan (*volatile food*) dibanding dengan administered prices. Penurunan harga bahan makanan (*volatile food*) menunjukkan bahwa masih lemahnya pengelolaan pasca panen Komoditas pangan sehingga diperlukan pola penanganan yang terpadu sebelum di jual ke pasar atau konsumen.

Salah satu upaya jangka panjang terkait pola penanganan pasca panen diperlukan pembangunan infrastruktur yang baik dan dukungan penganggaran yang memadai.

Rendahnya perubahan harga beberapa komoditas penting dimungkinkan adanya Potensi resiko menurunnya daya beli masyarakat akibat kesulitan ekonomi saat ini dan juga meningkatnya beberapa kebutuhan untuk keperluan sekolah.

Permasalahan lain adanya kenyataan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi di Kabupaten Sukabumi masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar seperti rendahnya konektivitas dan efisiensi sistem logistik, tingginya ketergantungan produktivitas pangan pada faktor cuaca, serta struktur pasar yang terdistorsi merupakan tantangan terbesar bagi terjaganya stabilitas harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sejalan dengan kebijakan yang ditempuh di tingkat pusat, pengendalian inflasi di Kabupaten Sukabumi pada intinya diarahkan untuk mempertegas komitmen dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif).

Untuk mewujudkan strategi 4K, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah memperkuat forum koordinasi lintas sektoral melalui Rapat Koordinasi, melakukan operasi pasar Murah menjelang Ramadhan, Melakukan Gerakan Pangan Murah, Melakukan Sidak Pasar, melakukan pengawasan secara intensif terhadap ketersediaan bahan pangan pokok terutama pada saat perayaan hari keagamaan, dan mengarahkan ekspektasi inflasi melalui berbagai program komunikasi secara intensif.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Koordinasi antara stakeholder yang berperan sebagai penentu kebijakan publik di daerah belum menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga belum menyentuh pada solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien. Selama ini hanya menasar pada persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah-langkah yang ditempuh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukabumi sebagai rekomendasi kebijakan untuk diimplementasikan adalah :

1. Untuk memastikan keamanan stok dan ketersediaan bahan pangan utama dan strategis di Kabupaten Sukabumi, maka dilakukan penghitungan proyeksi ketersediaan pangan utama dan strategis dengan menyusun Data Prognosis Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis Tahun 2024.
2. Untuk memastikan bahwa harga bahan pangan utama dan strategis meliputi beras, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng masih terjangkau oleh masyarakat, maka dilakukan monitoring harga dan pasokan pangan secara rutin setiap minggu sebagai langkah antisipasi ketersediaan pasokan pangan pokok.
3. Melakukan Sidak Pasar apabila terjadi gejolak kenaikan harga yang tidak terkendali.
4. Melakukan Gerakan Pangan Murah terutama komoditas Beras diberbagai lokasi di Kabupaten Sukabumi.
5. Dukungan penganggaran yang memadai